

MENGAKSELERASI PERTUMBUHAN EKONOMI RUMAH TANGGA MELALUI PENERAPAN KESETARAAN GENDER

Indri Septari, Adhitya Bagus Singandaru*, Muhamad Bai'ul Hak, Ahmad Zaenal Wafik, Ali

Akbar Hidayat

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

*ab.singandaru@unram.ac.id

ABSTRAK

Masyarakat pedesaan dan masyarakat ekonomi kelas bawah seringkali beranggapan bahwa ujung dari kehidupan perempuan adalah mengurus rumah tangga. Pembatasan akses yang diberikan oleh masyarakat membuat perempuan tidak dapat menyuarakan ekspresinya dalam berkarya. Salah satu tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs) adalah tercapainya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Pengaruh kesetaraan gender terhadap pertumbuhan ekonomi dalam lingkup rumah tangga sebagai langkah awal tercapainya pembangunan ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan penelitian, karangan bersifat ilmiah, peraturan perundangan, dan sumber-sumber tertulis lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak sedikit perempuan berperan dalam meningkatkan perekonomian keluarganya. Anggapan masyarakat tentang perempuan yang second class dari laki-laki dalam hak tidak dapat dibenarkan, perempuan mampu menjadi ibu rumah tangga sekaligus tulang punggung keluarga yang dapat meningkatkan pendapatan rumah tangganya.

Kata kunci: Kesetaraan Gender, Pertumbuhan Ekonomi Rumah Tangga.

ABSTRACT

Rural communities and lower-class economic communities often assume that the end of a woman's life is managing the household. Restrictions on access given by society make women unable to voice their expressions in their work. One of the goals of the Sustainable Development Goals (SDGs) is achieving gender equality and empowering women. The effect of gender equality on economic growth in the household sphere is the first step in achieving economic development. The research method used is qualitative with a literature study approach obtained from books, journals, research reports, scientific essays, laws and regulations, and other written sources. The results of the study show that not a few women play a role in improving the economy of their families. Society's assumption that women are second class to men in terms of rights cannot be justified, women are able to become housewives as well as the backbone of the family who can increase their household income.

Keywords: Gender Equality, Household Economic Growth.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak nomor empat di dunia. Pada tahun 2020 penduduk Indonesia mencapai angka 270.203.917 juta jiwa dengan persentase perempuan sebesar 49,5% (Badan Pusat Statistik, 2020). Perempuan dianggap sebagai kelompok kelas dua yang artinya tidak memiliki persamaan atas hak dengan laki-laki. Tidak sedikit juga yang menyatakan perempuan merupakan keterbelakangan dari seluruh aspek kegiatan sementara menurut berbagai kajian telah banyak yang membuktikan bahwa perempuan sebagai *agent of development* yaitu aset bangsa yang potensial dan berperan dalam pembangunan ekonomi (Padang dkk, 2019). Dengan demikian, peran perempuan tidak kalah penting dalam pembangunan ekonomi.

Gender sering kali menjadi penghalang berkembangnya perempuan dalam berkarya. Budaya dan pola pikir yang telah mengakar di kehidupan masyarakat terkait perempuan membuat kaum perempuan mengalami berbagai macam kendala dalam berkembang (Pertiwi dkk, 2021). Perempuan sering kali dilabeli sebagai manusia lemah dan tidak mempunyai power dalam dunia luas. Terlebih pada daerah dengan masyarakat rata-rata ekonomi kelas bawah, kaum perempuan memiliki akses terbatas dibandingkan laki-laki, dan masyarakat menganggap bahwa ujung dari kehidupan perempuan ialah mengurus rumah tangga.

Ketimpangan gender dalam bidang ketenagakerjaan merupakan isu dan permasalahan yang sering terjadi. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam penggunaan waktu di rumah, perbedaan tingkat pendidikan dan keterampilan, pembatasan sosial-budaya, segregasi sektoral dan pekerjaan, migrasi laki-laki dan akses ke input produktif, semuanya mengarah pada ketimpangan gender dalam partisipasi pekerjaan yang layak (Mehrotra & Sinha, 2017).

Ketimpangan gender yang terjadi sangat merugikan perempuan, hal ini mengakibatkan perempuan mendapatkan upah lebih kecil dibandingkan laki-laki. Selain itu, asumsi bahwa keluarga mengalokasikan sumber daya secara rasional mengakibatkan laki-laki memiliki investasi modal lebih tinggi daripada perempuan (Vininda & Yuliana, 2021). Seiring berkembangnya zaman, tingkat informasi dan kemampuan intelektual manusia turut berkembang. Untuk menjawab tantangan tersebut, peran perempuan terhadap perkembangan kehidupan senantiasa berubah sejajar dengan peran laki-laki, tak terkecuali

dalam meningkatkan pembangunan ekonomi (Dewi, 2021).

Pertumbuhan ekonomi suatu negara membutuhkan sumber daya manusia yang tinggi dengan tidak memperhatikan gender. Penurunan kesetaraan gender dari hasil pembangunan ekonomi dapat ditingkatkan dengan mendorong peran perempuan dalam pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diyakini sebagai indikator yang tepat dalam menggambarkan proses kemajuan pembangunan suatu negara (Arifin, 2018). Jika mengacu pada Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan, menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan punya hak dan peran yang sama dalam berpartisipasi baik dari aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

Kesetaraan gender juga menjadi salah satu tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (Arif L. &, 2022). Perempuan yang dinilai pasif dalam dunia kerja harus dibantah. Realita di lapangan menunjukkan bahwa perempuan dapat membantu perekonomian keluarga dan tidak sedikit menjadi tulang punggung keluarga atau berperan ganda. Berdasarkan uraian diatas mengenai permasalahan kesetaraan gender dalam lingkungan sosial dan ekonomi termasuk di Indonesia, dan belum terwujudnya program dunia yaitu SDGs mengenai kesetaraan gender. Maka peneliti tertarik untuk mengetahui akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui penerapan kesetaraan gender pada rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum tentang pertumbuhan ekonomi, kesetaraan gender dan pengaruh kesetaraan gender terhadap pertumbuhan ekonomi pada rumah tangga di Indonesia.

2. KAJIAN PUSTAKA

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah pertambahan pendapatan masyarakat disertai kenaikan nilai secara menyeluruh yang terjadi pada suatu wilayah (Azulaidin, 2021). Pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan pendapatan dalam jangka panjang sesuai kemampuan suatu negara. Pertumbuhan dalam hal ini memiliki tiga komponen: pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terwujud dari kemampuannya dalam menyediakan barang-barang ; kedua, melihat melihat teknologi yang semakinanggih merupakan faktor peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dapat memudahkan melakukan berbagai maam

pekerjaan di kalangan publik ; ketiga, penggunaan teknologi dalam kelembagaan dan pemahaman dapat dihasilakn secara mudah, cepat dan tepat, contoh: corak kehidupan desa dan kota dalam berkeluarga (Jhingan, 2019).

Pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan pendapatan perkapita tinggi dan peningkatan standar hidup rata-rata masyarakat dapat ditempuh melalui penggunaan sumber daya yang lebih produktif, termasuk tenaga kerjanya. Penyebab utama dari pertumbuhan ekonomi adalah tersedianya sumber daya serta peningkatan efisiensi penggunaan faktor produksi (Yuniarti et al., 2020). Sumber daya manusia yang tinggi memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi lebih merujuk pada perubahan kuantitatif (*quantitatif change*) dan dapat diukur menggunakan data produk domestik bruto (PDB) atau pendapatan output perkapita. Produk domestik bruto (PDB) merupakan total nilai pasar (*total market value*) dari barang-barang akhir dan jasa yang dihasilkan dalam suatu perekonomian selama satu tahun. Dimana tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut menunjukkan persentase kenaikan pendapatan nasional rill dalam satu tahun tertentu yang dibandingkan dengan pendapatan nasional rill pada tahun sebelumnya (Astutiningsih & Sari, 2017).

Kesempatan Kerja

Bekerja merupakan suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan maksud memperoleh pendapatan paling sedikit satu jam (tidak terputus). Kegiatan yang dimaksud dalam hal ini adalah pola kegiatan pekerja yang dibayar dalam membantu suatu usaha atau kegiatan (Badan Pusat Statistik, 2020). Kesempatan kerja merupakan kesempatan yang terjadi akibat perkembangan ekonomi tertentu, dalam arti bahwa kesempatan kerja mungkin saja sudah terisi atau belum terisi. Terciptanya kesempatan kerja (lapangan kerja) yang luas diharapkan mampu menyerap tenaga kerja sehingga penduduk yang bekerja dapat memperoleh pendapatan, dimana pendapatan sebagai unsur yang terdapat pada masyarakat yang sejahtera dan ditunjukkan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Indrajaya, 2016).

Dalam Indeks Pembangunan Manusia, pencapaian kemampuan dasar yang difokuskan yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG memiliki indikator sama seperti IPM yaitu harapan hidup, pendidikan dan pendapatan perkapita. Gender diartikan sebagai suatu konstruksi sosial yang dibuat oleh masyarakat untuk menunjukkan perbedaaan peran, fungsi

dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan atau benturan budaya setempat (Prasetyawati, 2018).

Peran aktif perempuan dalam bekerja dapat mengurangi kesenjangan gender sehingga dapat meningkatkan partisipasi angkatan kerja dan akan berpengaruh dalam peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) (Arif L. d., 2022). Peran wanita tidak terbatas pada pekerjaan domestik dalam ranah rumah tangga semata akan tetapi berperan dalam sektor usaha ekonomi. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 memperlihatkan bahwa 36,20 persen tenaga kerja formal diisi oleh wanita. Ini membuktikan bahwa peran perempuan tidak kalah penting dalam memegang fungsi- fungsi sentral keluarga, sekaligus sebagai sumber daya ekonomi (Fadilah, 2018).

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu studi literatur (library research). Studi literatur merupakan penelitian yang menggunakan sumber dan metode pengumpulan data diperoleh dengan mengambil data di pustaka, membaca, mencatat dan mengolah bahan penelitian (Melfianora, 2019).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Indonesia

Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan salah satu tema yang cukup serius dibahas dalam konvensi dan deklarasi nasional maupun global. Kesetaraan gender harus diterima dan diakui global. Kesetaraan gender penting dilakukan terhadap pembangunan manusia dan sistem patriarki dalam budaya masyarakat khususnya di Indonesia yang menjadikan laki-laki lebih tinggi kedudukannya dibandingkan perempuan. Secara historis juga perempuan tak jarang mengalami ketidakadilan, marginalisasi serta penindasan baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat umum. Perempuan dapat melakukan perubahan secara positif, sebagai indikator kemajuan suatu bangsa dan pemberi akses peluang dalam mengaktualisasi potensi dan bakat (Sari et al. 2021).

Pemberdayaan perempuan menjadi hal penting dalam menemukan masalah dan solusi yang dihadapi kaum wanita dan berperan aktif dalam berbagai hal menjadi kunci dalam menghadapi tantangan yang kerap kali menyudutkan. Kolaborasi, sinergi dan dukungan yang

ditujukan sesama perempuan menjadi kekuatan yang akan menghadirkan kesetaraan gender. Deklarasi Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa jika wanita diberikan akses, pengakuan dan menempatkan diri dalam gerakan serta perkembangan dapat membantu proses memerangi kemiskinan, kelaparan, penyakit dan merangsang pembangunan berkelanjutan. Setidaknya dengan hal tersebut, jumlah anak perempuan dan laki-laki akan bersekolah pada tingkat pendidikan yang setara. Dengan hal ini mungkin dunia tidak harus berupaya keras dalam memerangi kemiskinan, kelaparan, penyakit yang tersebar dan kerusakan lingkungan. Tolak ukur untuk menilai tingkat pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan mencakup tingkat pendidikan baik di tingkat sekolah dasar, menengah dan tinggi, pekerjaan maupun sistem politik (Chotim 2020).

Pendidikan sebagai tombak dalam mengendalikan kehidupan. Perempuan harus memiliki tombak yang sama dengan kaum laki-laki. Masyarakat desa yang masih mendiskriminasi hak pendidikan bagi perempuan menjadi tembok penghalang tercapainya kesetaraan gender. Faktor utama diskriminasi hak pendidikan bagi masyarakat pedesaan meliputi norma atau aturan tradisional yang dapat membunuh karakter, laju ekonomi, bentuk fisik, penafsiran salah terhadap ajaran agama, serta keyakinan budaya yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat pedesaan (Ratnawati, Sulistyorini, and Abidin 2019). Berbeda halnya dengan masyarakat perkotaan, pola pikir yang dimiliki memberikan akses jauh lebih besar untuk perempuan mengenyam pendidikan bahkan tak sedikit mendukung anak perempuannya menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Kebebasan yang diberikan terhadap perempuan dalam mengimplementasikan hak pendidikannya sebagai bentuk dukungan kesetaraan gender dalam hak memperoleh pendidikan. Menurut Arivia sebagaimana yang dikutip oleh Kusumawardhana and Abbas (2018), (1) “Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 Pasal 31 Ayat 1: setiap warga negara baik perempuan maupun laki-laki mendapatkan kesempatan setara untuk mengecap pendidikan” (2) Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional merupakan landasan hukum yang kuat untuk melaksanakan PUG khususnya bagi jajaran pemerintah.

Pemerintah Indonesia saat ini telah membuat kurikulum gender dimana perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh pendidikan wajib belajar 12 tahun serta tidak membatasi bidang yang diinginkan. Saat ini di dunia pendidikan misalkan saja jurusan teknik, sebelumnya perempuan tidak boleh mengambil jurusan tersebut namun

saat ini perempuan leluasa dalam mengekspresikan haknya. Hal ini atas perjuangan pahlawan wanita Indonesia yaitu RA Kartini yang telah berjuang dalam menghapus diskriminasi kesetaraan gender dalam memperoleh pendidikan. Figur wanita yang telah menjunjung tinggi hak dan martabat perempuan dalam bidang pendidikan telah membawa pengaruh besar di dunia pendidikan saat ini (Ratnawati, Sulistyorini, and Abidin 2019). Kesetaraan gender dalam dunia pendidikan ini sebagai akses dan memperoleh kesempatan yang sama dalam memajukan dunia pendidikan serta menjadi aset negara yang berharga.

Tabel 4.1 Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan Dan Jenis Kelamin 2019-2021

Jenis Kelamin	SD/Sederajat			SMP/Sederajat			SMA/Sederajat		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Laki-laki	94.46	95.69	97.00	83.34	86.26	87.04	57.00	62.15	64.48
Perempuan	96.54	96.33	97.76	87.23	89.58	90.78	59.75	65.85	67.46

Sumber: Badan Pusat Statistik 2022

Tingkat penyelesaian pendidikan perempuan dan laki-laki di Indonesia saat ini dapat dikatakan setara baik ditingkat sekolah dasar, maupun menengah pertama dan menengah atas. Persentase tingkat penyelesaian pendidikan yang mendekati angka 100% menunjukkan hampir seluruh anak dan remaja telah menyelesaikan jenjang pendidikan sesuai usia atau yang seharusnya tanpa mengalami keterlambatan yang signifikan. Dalam tabel 4.1 di atas menunjukkan pemerintah berupaya untuk terus meningkatkan dan peduli terhadap pendidikan di Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin.

Tujuan Pembangunan Milenium dalam hal kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan lainnya menurut Chotim adalah dalam bentuk lapangan pekerjaan. Budaya patriarki yang masih kental dilingkungan masyarakat menjadi penyebab kesetaraan gender di dunia kerja. Tidak bisa dipungkiri ini akan membawa pengaruh besar dilingkungan pekerjaan, laki-laki diberikan kemudahan dalam mendapatkan posisi tinggi dan gaji lebih besar dibandingkan perempuan. Keterlibatan perempuan dalam bidang industri diperkirakan hanya 11% dibandingkan laki-laki 30% dan tidak ada partisipasi perempuan dalam kerja manual yang intens seperti pertambangan dan penggalian yang semata-mata karena jenis kelamin (Chotim, 2020).

Disparitas gender pada tenaga kerja formal adalah 87% pekerja laki-laki dan 11% perempuan sementara dengan volume bisnis tahunan lebih dari US \$ 42 juta hampir tidak melibatkan perempuan (Sugiarti and Sutrisni 2020). Tingkat pengangguran perempuan

memang lebih rendah dibandingkan laki-laki namun mayoritas perempuan bekerja di sektor informal dengan persentase 65%. Akan tetapi bekerja di sektor informal memiliki banyak dampak terlebih pada upah dan perlindungan sosial yang lebih sedikit sehingga banyak pekerja perempuan berada diposisi yang lebih rentan di dunia kerja (Karunia 2022).

Menurut West & Turner sebagaimana yang dikutip oleh Stellarosa and Silaban (2019) mengenai asumsi teori kelompok terhadap perempuan adalah sebagai berikut: 1) perempuan menanggapi dunia secara berbeda dengan laki-laki karena adanya perbedaan pengalaman dan aktivitas yang berakar pada pembagian pekerjaan; 2) dilihat dari dominasi politiknya, laki-laki memiliki sistem persepsi yang dominan, yang dapat menghambat ekspresi bebas perempuan mengenai dunia; 3) agar dapat berpartisipasi di dalam masyarakat, maka perempuan harus dapat mengubah perspektif sesuai dengan sistem ekspresi yang dapat diterima laki-laki. Permasalahan ini timbul bukan karena ketidakmampuan perempuan tetapi tidak diberikan akses bebas untuk mengekspresikan diri.

Diskriminasi yang diterima oleh perempuan di dunia kerja terjadi karena banyak tempat kerja seperti bagian media dalam profesi jurnalis yang menggunakan standar UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang pengupahan pekerja perempuan. Dalam UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 31 ayat (3) menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Hal inilah banyak digunakan kepada pekerja perempuan terkait dengan tunjangan keluarga yang diberikan meskipun perempuan sebagai kepala keluarga (Stellarosa and Silaban 2019).

Dikutip dari Badan Pusat Statistik pada Februari 2022 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap perempuan masih berada jauh di bawah laki-laki dimana TPAK laki-laki sebesar 83,6% sedangkan perempuan hanya 54,2%. Sehingga dari 144 juta angkatan kerja hanya 40% perempuan (Karunia 2022). Dunia kerja yang belum sepenuhnya terbuka dan adil bagi perempuan akan terus menjadi isu yang mendukung adanya ketidakadilan gender.

Penetapan kebijakan dan menjalankan program pembangunan responsif gender oleh pemerintah tidak membuat perempuan terhindar dari diskriminasi, keterbatasan akses dalam dunia kerja, dan kesenjangan upah. Fenomena kesenjangan upah antar gender ini tidak terlepas dari dunia kerja. Kesenjangan upah antar gender hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia.

Diskriminasi yang terjadi di pasar tenaga kerja terkait dengan upah merujuk terhadap perbedaan karakteristik gender antar perempuan dan laki-laki dalam bekerja. Menurut

Jacobsen sebagaimana yang dikutip oleh Laurensia and Yuliana (2021) bahwa kesenjangan upah yang terjadi disebabkan oleh investasi sumber daya manusia perempuan dalam hal pendidikan, pelatihan kerja dan pengalaman kerja yang lebih rendah. Preferensi perempuan dalam memilih jenis pekerjaan, anggapan kurang berkontribusinya perempuan terhadap pekerjaan, menentukan jam kerja dan penempatan perempuan pada posisi yang lebih rendah juga sebagai penyebab terjadinya kesenjangan upah antar gender.

Berdasarkan penelitian dari Laurensia and Yuliana (2021) mengungkapkan bahwa kesenjangan upah antar gender mengenai upah individu dipengaruhi oleh: (1) karakteristik sosial demografi meliputi daerah tempat tinggal, status perkawinan, dan status dalam rumah tangga; (2) karakteristik modal manusia meliputi pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja; dan (3) karakteristik pekerjaan meliputi jam kerja, status kegiatan, serikat pekerja, lapangan usaha dan jenis pekerjaan.

Stigma Gender dan Persepsi Kodrat Antara Perempuan dan Laki-laki dalam Persepsi Masyarakat

Teori *patriarchy* mengungkapkan bahwa laki-laki mendominasi masyarakat sejak awal sejarah kehidupan manusia. Rentang usia manusia yang singkat dan untuk melipatgandakan kelompok, perempuan harus melahirkan banyak anak. Karena hanya perempuan yang dapat hamil, melahirkan dan menyusui anak sehingga kehidupan perempuan terbatas. Hal ini berakibat terhadap kehidupan perempuan yang berakhir di rumah sebagai ibu rumah tangga, sedangkan laki-laki berburu binatang, berdagang, menjalin komunikasi dan bersantai dengan orang lain (Ilhamuddin 2017). Aktifitas dari zaman nenek moyang ini terus dilestarikan hingga saat ini dan menjadi kenormalan di masyarakat.

Sosial budaya dan agama memiliki pengaruh signifikan terhadap pelaksanaan kesetaraan gender. Gender dianggap sebagai pembagian karakteristik terhadap keberadaan manusia. Karakteristik tersebut sebagai pembeda antara perempuan dan laki-laki. Budaya patriarki di masyarakat mengenai peran perempuan dan laki-laki sebagai pemikiran dasar yang melahirkan ketimpangan gender. Stigma masyarakat mengenai hakikat perempuan idealnya penurut dan harus berdiam di rumah untuk mengurus rumah tangga berbeda dengan laki-laki yang superior dan dominan. Perbedaan stigma masyarakat menimbulkan kesenjangan peran yang seolah-olah perempuan hanya duduk manis di rumah mengurus rumah tangga dan laki-laki bekerja serta beraktivitas di luar rumah. Pembagian fitrah manusia

yaitu perempuan memiliki sifat lembut dan penuh kesabaran serta laki-laki memiliki sifat kebalikan dari perempuan (Novianti, Muyasaroh, and Mustafiyanti 2022). Pemberian ruang untuk perempuan dalam berekspresi dan memaksimalkan potensi perlu didukung agar dapat mengikis pemikiran masyarakat yang akan menghambat perempuan berkembang.

Agama sebagai pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat Indonesia sehingga agama sangat melarang adanya diskriminasi terhadap gender (Purnamasari 2021). Masyarakat Aceh yang mayoritas Islam, anak laki-laki sejak kecil bebas di dapur bersama ibu dan saudara perempuannya. Akan tetapi, di daerah lain anak laki-laki berada di dapur dianggap hal tabu (Novianti dkk, 2022). Dalam ajaran agama Islam laki-laki dan perempuan pada dasarnya memiliki kedudukan yang sama sesuai dengan fitrah masing-masing. Selama manusia dapat menjaga fitrahnya maka kedudukan diantara keduanya memiliki kesempatan yang sama dalam menjalani kehidupan baik di bidang pendidikan, sosial masyarakat, politik dan sebagainya (Ilhamuddin 2017).

Dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 23, Allah berfirman “Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgahsana yang besar.” Perempuan yang dimaksud adalah ratu yang memerintah kaum Saba yang dikenal dalam sejarah bernama Balqis. Dalam kepemimpinan ratu Balqis, rakyat memiliki kehidupan yang makmur dan tentram. Dan ayat ini mempertegas bahwa perempuan bisa menjadi pemimpin ketika memiliki kapasitas dan kapabilitas (Mahardhika 2020). Saat ini juga banyak pemimpin dunia berjenis kelamin perempuan, namun tetap saja dalam masyarakat, di negara berkembang khususnya, sebagian besar beranggapan perempuan tidak perlu menempuh pendidikan yang tinggi, mengejar karir layaknya laki-laki jika berakhir di dapur, kasur dan sumur.

Penyebab lain dari adanya kesenjangan upah gender adalah masyarakat yang cenderung mengkaitkannya dengan perbedaan sifat perempuan dan laki-laki secara general. Stigma bahwa perempuan bersifat lebih lembut, cengeng dan sensitif berbanding terbalik dengan laki-laki dan membawa label yang sama bagi setiap perempuan sehingga menghalangi perempuan dalam mencari pekerjaan dan mendapatkan posisi tinggi di dunia kerja. Laki-laki memiliki sifat kepemimpinan yang natural sedangkan perempuan bersifat subordinat (Nur dan Nurani, 2019). Unsur maskulinitas laki-laki dinilai lebih positif dalam memimpin dibandingkan sifat yang femininitas yang dimiliki perempuan. Anggapan ini menjadi belenggu terhadap adanya perempuan sebagai pemimpin sebuah negara sehingga akan menghambat

proses terwujudnya kondisi dunia yang lebih setara (Aprilia dkk, 2020). Fatalnya lagi maskulinitas dan feminitas dianggap sebagai bagian dari kodrati, padahal sifat tersebut sebagai hasil dari struktural sosial masyarakat.

Pertumbuhan Ekonomi melalui Penerapan Kesetaraan Gender pada Rumah Tangga

Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu (Amory 2019). Pertumbuhan ekonomi relevan dengan kesetaraan gender. Karena perempuan yang berpenghasilan dapat menopang kehidupannya sendiri dan keluarga yang akan meningkatkan konsumsi rumah tangga sehingga dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi.

Kesetaraan gender menjadi pendorong peran perempuan dalam kegiatan produksi dan konsumsi. Pemberian akses yang baik bagi perempuan akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang rasional. Pertumbuhan ekonomi yang rasional akan menarik investor dalam melakukan investasi karena pertumbuhan ekonomi mencerminkan pergerakannya sektor-sektor ekonomi suatu negara (Sustainable Development Goals, 2020). Pertumbuhan ekonomi meningkatkan kesempatan kerja tetapi tidak dapat menekan ketimpangan gender. Pertumbuhan ekonomi yang merata merupakan bagian penting dalam pembangunan ekonomi.

Pada semester I 2022 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 275.361.267 jiwa dengan persentase laki-laki 50,48% dan perempuan 49,52% (Kemendagri 2022). Persentase jumlah penduduk Indonesia bertolak belakang dengan jumlah penduduk perempuan dan laki-laki yang aktif dalam perekonomian. Menurut Kurnia (2022), dari 144 juta jiwa angkatan kerja perempuan hanya memiliki 40% TPAK. Menguatnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan jauh di bawah laki-laki karena banyak pekerja perempuan tidak diupah. Penelitian yang dilakukan Amory (2019) terhadap 100 orang penduduk berumur 15 tahun keatas di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2018 diantaranya 66 orang adalah perempuan yang bekerja sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar.

Ketimpangan gender akan terus terjadi baik dari aspek kehidupan manusia ataupun gap dari pencapaian manfaat hasil pembangunan. Seharusnya perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam bekerja. Dalam rumah tangga, pandangan masyarakat mengenai tanggung jawab mutlak ekonomi keluarga hanya ada ditangan ayah/suami, dan

tanggung jawab domestik ada ditangan ibu/istri. Namun faktanya dilapangan banyak kaum perempuan mampu menjadi tulang punggung keluarga bahkan berperan ganda yaitu dapat menjadi ibu rumah tangga dan kepala keluarga.

Seorang perempuan yang berperan ganda dalam keluarga, maka banyak hal yang membatasi dirinya dengan keluarga, antara lain yaitu waktu yang mulai berkurang untuk keluarga dan untuk lingkungan sekitarnya. Hal ini disebabkan karena sebagian besar waktunya digunakan untuk bekerja mencari nafkah (Arafah 2022). Perempuan yang berperan ganda dalam keluarga haruslah mampu menjalankan keduanya secara seimbang agar tidak memicu persoalan dalam rumah tangga.

Perempuan secara mandiri dapat menghidupi keluarga dan mampu bertahan dalam situasi kesulitan ekonomi keluarga (Widaningsih n.d.). Hal ini terjadi bukan tanpa alasan. Beberapa alasan penyebab terjadinya hal tersebut seperti suami sedang sakit atau ditinggal meninggal, adanya tuntutan ekonomi, sosial, dan tuntutan lainnya. Fenomena perempuan dapat melakukan pekerjaan yang dianggap hanya bisa dilakukan oleh laki-laki banyak dijumpai di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai contoh para perempuan Bali yang multitasking, sangat berperan dalam rumah tangga, kehidupan sosial, dan agama. Fenomena ini juga dapat dilihat pada perempuan Papua khususnya suku Dani, dimana mereka memiliki tanggungjawab yang cukup vital, dimana mereka harus bertanggungjawab atas keberlangsungan keturunan yaitu mereka harus siap melahirkan, dan berperan untuk menari nafkah khususnya dalam memelihara ladang, kebun, sawah ataupun ternak sebagai persiapan dan penyelenggaraan upacara adat mereka. Gambaran seperti ini juga dapat dilihat di Provinsi NTT yang sebagian besar para perempuan yang akan mencari nafkah dalam menghidupi keluarganya (Fadilah 2018).

Naluri seorang ibu akan melakukan pekerjaan apapun untuk menghidupi keluarganya seperti pedagang di pasar tradisional, buruh pabrik, buruh tani, tenaga kerja indonesia (TKI), dan masih banyak pekerjaan yang dilakoni perempuan hingga saat ini dan mampu sebagai sumber ekonomi keluarga. Tetapi banyak diantara beberapa wilayah di Indonesia menganggap bahwa peran perempuan dalam memperkuat ekonomi keluarga tidak diperhitungkan dan hanya dianggap bantuan dalam mencari pendapatan rumah tangga. Karena perempuan dianggap sebagai makhluk yang berada pada posisi second class yang dilarang untuk mengambil peran strategis sebagaimana layaknya laki-laki dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, politik dan lainnya.

Disamping konsekuensi yang harus diterima perempuan yang berperan ganda dalam keluarganya, hal tersebut dilakukan perempuan bukan tanpa alasan yang jelas terutama mengenai kondisi keuangan keluarga. Bisa dikarenakan suami tidak dapat mampu lagi melakukan tugasnya sebagai kepala keluarga yang mencari nafkah terutama jika keadaan suami sakit dan sebagainya atau suami tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya. Di sisi lain juga perempuan ingin mengembangkan mimpi dan karirnya atau juga melakukan kegiatan sosial yang bermanfaat bagi orang lain selama hal tersebut tidak menghalangi dan mengabaikan tugas seorang istri dan ibu rumah tangga.

Menurut penelitian Rozalinda sebagaimana yang dikutip oleh Arafah (2022), perempuan turut bekerja atau mencari nafkah, diantaranya:

1. Kebutuhan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam keluarga sehingga mengharuskan untuk bekerja di luar rumah baik sebagai pekerja formal maupun non formal.
2. Kebutuhan relasi-sosial sebagai keinginan yang tinggi bagi perempuan untuk bekerja demi membangun relasi, mencari identitas sosial yang lebih baik dan menjadi hal menyenangkan dibandingkan hanya berdiam diri di rumah.
3. Kebutuhan untuk mengaktualisasi diri dalam beragam ekspresi, seorang perempuan yakin bahwa dengan bekerja hidup yang dilaluinya lebih bermakna, bermanfaat bagi sesama, aktualisasi diri, mendapatkan pengalaman dan sebagainya.

Gender tidak menghalangi seseorang untuk melakukan aktifitas yang dapat memperbaiki keadaannya terutama dalam hal perekonomian. Seorang perempuan yang memutuskan untuk bekerja berharap dapat membantu dan meningkatkan taraf perekonomian keluarga (Yuliati and Widnyani 2020). Besarnya pendapatan akan menggambarkan ekonomi keluarga dalam masyarakat (Badje 2022).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Gender seringkali menjadi penghalang perempuan dalam berkarya. Perempuan dianggap second class oleh masyarakat yang berarti tidak memiliki persamaan atas hak dengan laki-laki. Pemberdayaan perempuan perlu dilakukan dalam bentuk pendidikan dan kesempatan kerja di dunia kerja untuk menghadapi solusi akan masalah ketimpangan gender

yang kerap kali merendahkan posisi perempuan. Jika perempuan diberikan akses yang luas untuk berekspresi dan mengembangkan diri untuk menjadi manusia berkualitas mungkin pemerintah tidak berupaya keras dalam memerangi kemiskinan, kelaparan, kerusakan lingkungan dan rendahnya kesehatan perempuan. Pemerintah sudah berupaya keras dalam mengurangi ketimpangan gender yang ada, akan tetapi bagi masyarakat pedesaan dan masyarakat kelas bawah masih memegang norma atau aturan tradisional bahwa hakikat perempuan idealnya berdiam diri di rumah untuk mengurus rumah tangga dan laki-laki yang akan bekerja dan beraktiitas di luar rumah.

Namun faktanya di lapangan banyak perempuan yang bekerja dan menjadi tulang punggung keluarga bahkan berperan ganda. Perempuan secara mandiri mampu menghidupi dirinya dan keluarga serta mampu bertahan dalam situasi kesulitan ekonomi keluarganya. Perempuan tidak akan keberatan melakukan pekerjaan apapun demi sesuap nasi untuk keluarganya dan tak jarang perempuan bisa menghidupi serta meningkatkan taraf perekonomian keluarga tanpa adanya laki-laki. Sehingga perempuan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjadi agent of development yaitu sebagai aset bangsa yang potensial dalam pembangunan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amory, Jeffriansyah Dwi Sahputra. 2019. "Peranan Gender Perempuan Dalam Pembangunan." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan* Vol 1, No. (1): 1–15.
- Arafah, Jurnal. 2022. Perempuan Dan Kontribusi Ekonomi Keluarga Dalam Perspektif Islam: Sebuah Praktik "*Jurnal Agama Dan Kebudayaan*" 8 (1).
- Arif, L. d. (2022). Peran Perempuan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Karesidenan Pati Periode 2015-2020. *Social Science Studies* , 197- 214.
- Arifin, S. (2018). Kesetaraan Gender dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Kesetaraan Gender dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia* , 27-41.
- Aprilia, Bella, Florencia Maria Surya, and Mentari Svarna Pertiwi. 2020. "Analisis Pergeseran Makna Partisipasi Politik Perempuan Berdasarkan Karakteristik Feminitas Dan Maskulinitas Dalam Kepemimpinan Perempuan: Studi Kasus Penanganan COVID-19 Di Jerman, Selandia Baru, Dan Taiwan." *Jurnal Sentris*. <https://doi.org/10.26593/sentris.v1i2.4294.91-108>.
- Astutiningsih, S. E., & Sari, C. M. (2017). Pemberdayaan Kelompok Agroindustri Dalam Upaya Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*. <https://doi.org/10.20473/jiet.v2i1.5500>
- Azulaidin, A. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Juripol*. <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i1.10961>
- Badan Pusat Statistik. 2022. "Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan Dan Jenis Kelamin 2019-2021." <https://www.bps.go.id/indicator/28/1982/1/tingkat-penyelesaian-pendidikan-menurut-jenjang-pendidikan-dan-jenis-kelamin.html>.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2020-2022*. Retrieved Oktober 10, 2022, from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>
- Badan Pusat Statistik (2020). *Keadaan Pekerja di Indonesia Agustus 2020*. Retrieved Oktober 18, 2022, from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/publication/2020/11/30/351ae49ac1ea9d5f2e42c0da/keadaan-pekerja-di-indonesia-agustus-2020.html>
- Chotim, Erna Ermawati. 2020. "Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Di Indonesia: Keinginan Dan Keniscayaan Pendekatan Pragmatis (Studi Terhadap Ukm Cirebon Home Made)." *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional* 2 (1): 70–82. <https://doi.org/10.54783/jin.v2i1.357>.
- Dewi, R. K. (2021). Peran Wanita Sebagai Pendorong Ekonomi Dan Keuangan Syariah Di Tanah Air. *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, 6-10.
- Fadilah, Sri. 2018. "Kesetaraan Gender : Fenomena Pergeseran Peran Ekonomi Wanita Dari Tulang Rusuk Menjadi Tulang Punggung." *Gender Dan Anak* 1 (1): 18–26.
- Fransiska Ayuka Putri Pradana. (2020). Pengaruh Budaya Literasi. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 81–85.
- Heriyanto, H. (2018). Thematic Analysis sebagai Metode Menganalisa Data untuk

- Penelitian Kualitatif. *Anuva*. <https://doi.org/10.14710/anuva.2.3.317-324>
- Ilhamuddin. 2017. "Islam Dan Kesetaraan Gender: Hubungan Pengoptimalisasi Potensi Kaum Perempuan Indonesia Menurut Ajaran Islam." <https://sumbar.kemenag.go.id/v2/post/2055/islam-dan-kesetaraan-gender-hubungan-pengoptimalisasi-potensi-kaum-perempuan-indonesia-menurut-ajaran-islam.html>.
- Indrajaya, A. d. (2016). Pengaruh Infrastruktur, Investasi, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kesempatan Kerja. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 1435-1462.
- Jhingan, M. (2019). *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*. Jakarta: RajawaliPers.
- Karunia, Ade Miranti. 2022. "Angkatan Kerja Perempuan Masih Rendah, Menaker: Budaya Patriarki Masih Mengakar." <https://amp.kompas.com/money/read/2022/07/29/210000426/angkatan-kerja-perempuan-masih-rendah-menaker-budaya-patriarki-masih-mengakar>.
- kbbi.lectur.id. (n.d.-a). *3 Arti Kata Mencari di Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI)*. Kbbi.Lectur.Id. <https://kbbi.lectur.id/mencari>
- kbbi.lectur.id. (n.d.-b). *3 Arti Kata Mengolah di Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI)*. Kbbi.Lectur.Id. <https://kbbi.lectur.id/mengolah>
- Kemendagri. 2022. "Dukcapil Kemendagri Rilis Data Penduduk Semester I Tahun2022, Naik 0,54% Dalam Waktu 6 Bulan." Kemendagri.Go.Id. 2022. <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1396/dukcapil-kemendagri-rilis-data-penduduk-semester-i-tahun-2022-naik-054-dalam-waktu-6-bulan>.
- Kurnia. 2021. Studi Literatur: Media Pembelajaran yang Digunakan Pada Model Pembelajaran Inquiry Learning. *Skripsi*. Makassar: Universitas Muhamma diyah Makassar.
- Kusumawardhana, Indra, and Rusdi Jarwo Abbas. 2018. "Indonesia Di Persimpangan: Urgensi „Undang-Undang Kesetaraan Dan Keadilan Gender“ Di Indonesia Pasca Deklarasi Bersama Buenos Aires Pada Tahun 2017." *Jurnal HAM* 9 (2): 153. <https://doi.org/10.30641/ham.2018.9.153-174>.
- Laurensia, Maura Lovieta Jean, and Lia Yuliana. 2021. "Penerapan Metode Dekomposisi Blinder-Oaxaca untuk Menganalisis Kesenjangan Upah Antar Gender di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018." *Seminar Nasional Official Statistics*. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2020i1.475>.
- Mahardhika, Gita Rama. 2020. "Belenggu Budaya Patriarki Terhadap Kesetaraan Gender Di Indonesia." <https://www.its.ac.id/news/2020/04/22/belenggu-budaya-patriarki-terhadap-kesetaraan-gender-di-indonesia/>.
- Mehrotra, S., & Sinha, S. (2017). Explaining falling female employment during a high growth period. *Economic and Political Weekly*, 52(39), 54–62.
- Melfianora. (2019). Penulisan Karya Tulis Ilmiah dengan Studi Literatur. *OpenScience Framework*, 1–3.
- Novianti, Dwi, Muyasaroh, and Mustafiyanti. 2022. "Persepsi Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Keluarga." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 1 (11): 1517–22.

- Nur, Aida, and Farida Nurani. 2019. "Kesetaraan Gender Dan Gap Pendapatan di Indonesia."
- Padang, dkk. (2019). ANALISIS PENGARUH KESETARAAN GENDER TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI SUMATERA BARAT. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 969-976.
- Pertiwi, dkk. (2021). Pengaruh Ketimpangan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi. *Jurnal Ekonomi Aktual* , 69-76.
- Prasetyawati, N. (2018). PERSPEKTIF GENDER DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL INDONESIA. *Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0*, 54-60.
- Purnamasari, Deti Mega. 2021. "Menteri PPPA: Stigma Perempuan Lebih Rendah Dari Laki-Laki Merupakan Akar Masalah Ketimpangan Gender." <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/28/14440121/menteri-pppa-stigma-perempuan-lebih-rendah-dari-laki-laki-merupakan-akar#>.
- Ratnawati, Dewi, Sulistyorini Sulistyorini, and Ahmad Zainal Abidin. 2019. "KESETARAAN GENDER TENTANG PENDIDIKAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN." *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*. <https://doi.org/10.15408/harkat>. v15i1.13436.
- Sari, Avid Leonardo, Irwandi Irwandi, Heru Rochmansjah Rochmansjah, Irfan Nurdiansyah, and Diena Fanny Aslam. 2021. "UMKM, Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia*. <https://doi.org/10.11594/jesi.01.01.03>.
- Badje, Yanto. 2022. "Peran Perempuan Meningkatkan Ekonomi Keluarga Melalui Usaha Tenun di Kel. Popalia Kec. Togo Binongko" *Jurnal Akademik Pendidikan Ekonomi*. 9: 1–6.
- Stellarosa, Yolanda, and Martha Warta Silaban. 2019. "Perempuan, Media Dan Profesi Jurnalis." *Jurnal Kajian Komunikasi*. <https://doi.org/10.24198/jkk.v7i1.18844>.
- Sugiarti, Yayuk, and Sutrisni Sutrisni. 2020. "PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI WIRUSAHA PENGOLAHAN BUAH SIWALAN DI DESA BANUAJU TIMUR KECAMATAN BATANG-BATANG." *Jurnal ABDIRAJA*. <https://doi.org/10.24929/adr.v3i2.896>.
- Sustainable Development Goals. 2020. "Kesetaraan Gender Dan Pertumbuhan Ekonomi." SDGs Center Universitas Diponegoro. <https://sustainability.undip.ac.id/2020/10/19/kesetaraan-gender-dan-pertumbuhan-ekonomi/>.
- Vininda, S., & Yuliana, L. (2021). Penerapan Regresi Data Panel Pengaruh Kesetaraan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Riau Periode 2011-2015. *Seminar Nasional Official Statistics, 2020(1)*, 549–559. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2020i1.416>
- Widaningsih, Lilis, Pendidikan Provinsi, and Jawa Barat. n.d. "RELASI GENDER DALAM KELUARGA: INTERNALISASI NILAI-NILAI KESETARAAN," 1–7.
- Yuliati, I Gusti Ayu Made Anom, and Ida Ayu Putu Sri Widnyani. 2020. "Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 20 (03): 80–81.
- Yuniarti, P., Wianti, W., & Nurgaheni, N. E. (2020). Analisis Faktor-faktor yang

Mempengaruhi Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam*. <https://doi.org/10.36407/serambi.v2i3.207>